

Artikel Riset Reguler tentang Akuntansi)

Analisis Realisasi Belanja Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon

Expenditure Realization Analysis at the Tomohon Class II Children's Special Guidance Institute

Purnomo C. Suroso¹, Jantje J. Tinangon², Heince Wokas³

^{1,2,3} Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi,
Jl. Kampus Bahu, Manado, 95115, Indonesia

E-mail : charles.suroso28@gmail.com, janjantinangon@gmail.com

Abstrak: Realisasi belanja bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). APBN diharapkan mampu berperan dalam menciptakan stimulasi fiskal bagi bergeraknya roda perekonomian masyarakat. Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui realisasi belanja pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon. Jenis penelitian adalah kualitatif. Dan metode analisis yang digunakan dalam penelitian adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian yang diperoleh, Pagu LPKA Kelas II Tomohon pada tahun 2018-2020 rata-rata presentase realisasinya diatas 96%. Pada tahun 2018 presentase realisasinya mencapai 97,83%. Di tahun 2019 presentase realisasinya mencapai 98,45% . Dan pada tahun 2020 presentase realisasinya mencapai 96,60%. Hal ini dikarenakan pandemi covid-19. Ada anggaran yang tidak sepenuhnya diserap.

Kata Kunci: Analisis, Realisasi, Belanja Negara

Abstract: Realization of expenditure is part of the State Revenue and Expenditure Budget, wich is the annual financial plan of the Indonesian government apporoved by the House of Representatives. The APBN is expected to be able to play arole in creating iscal stimulation for the movement of the community's economy. This research aims to determine the realization of spending at the Class II Tomohon Special Child Development Institute. This type of research is qualitative. And the analytical method used in the research is descriptive analysis. The results of the research obtained, the Tomohon LPKA Class II Ceiling in 2018-2020 the average percentage of realization is above 96%. In 2018 the percentage of realization reached 97.83%. In 2019, the percentage of realization reached 98.45%. And in 2020 the percentage of realization reached 96.60%. This is due to the COVID-19 pandemic. There are budgets that are not fully absorbed.

Keywords: Analysis, Realization, State Expenditure

1. PENDAHULUAN

Dewasa ini hampir setiap pemerintah dalam suatu negara ikut campur tangan dalam kegiatan ekonomi nasional. Campur tangan pemerintah dalam kegiatan ekonomi tersebut memberi konsekuensi logis, konsekuensi dari keterlibatan pemerintah dalam kegiatan perekonomian adalah pemerintah akan membutuhkan aparat, investasi, sarana dan prasarana karena hal tersebut harus mengeluarkan biaya untuk mencapai tujuan pembangunan. Rincian tentang penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya akan nampak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Anggaran merupakan salah satu komponen utama dalam melaksanakan suatu program atau agenda. Sebelum merealisasikan suatu program, sangat dibutuhkan perencanaan yang matang untuk mencapai tujuan dari program tersebut. Salah satunya adalah anggaran.

Di lingkungan pemerintah maupun sektor publik, anggaran merupakan alat untuk mencapai target atau sasaran yang ingin dicapai pada suatu periode tertentu. Anggaran pada lingkungan sektor publik adalah sesuatu yang rumit, berbeda dengan sektor swasta yang merupakan sasaran utamanya adalah mencari laba atau keuntungan. Pada sektor swasta anggaran merupakan hal yang dirahasiakan, namun hal ini tidak berlaku pada sektor publik, anggaran yang telah disusun harus diinformasikan kepada publik untuk dievaluasi dan di

Diterima: 18-04-2022; Disetujui untuk Publikasi: 21 -04-2022

Hak Cipta © oleh Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum
p-ISSN: 24072-361X

perbaiki pada periode yang akan datang sehingga dengan adanya transparansi ini membuat pemerintah dapat melakukan reformasi dalam hal administrasi publik, termasuk pula pada sistem anggaran. Pada umumnya APBN disusun untuk satu tahun anggaran. Dalam APBN ini isinya daftar sistematis dan secara terperinci, memuat rencana penerimaan dan pengeluaran Negara Indonesia dalam kurun waktu satu tahun anggaran adalah dimulai dari 1 Januari sampai 31 Desember.

Pembuatan APBN termasuk perubahan dan pertanggungjawaban setiap tahunnya yang di tetapkan melalui undang-undang. Landasan hukum APBN sendiri sudah di jelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23 ayat 1 yang isinya (bahwa tiap-tiap tahun APBN ditetapkan dengan undang-undang). Apabila DPR tidak menyetujui anggaran yang diusulkan oleh pemerintahan, maka pemerintahan akan menggunakan anggaran yang tahun lalu. Dalam pelaksanaan kebijakan fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diharapkan pada kondisi yang sulit dan dilematis. Di satu sisi seiring dengan kompleksnya kadar permasalahannya yang dihadapi masyarakat, peranan kebijakan fiskal yang lebih besar justru dibutuhkan untuk menciptakan stabilitas guna mempercepat usaha pembangunan perekonomian nasional.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teoritis

Akuntansi. Akuntansi adalah adalah kegiatan jasa yang fungsinya untuk menyediakan informasi secara kuantitatif terutama yang bersifat keuangan agar berguna dalam pengambilan keputusan-keputusan ekonomi sampai membuat pilihan-pilihan nalar antara berbagai alternatif tindakan (Muhammad, 2020:10). Akuntansi dapat disebut sebuah sistem yang memberikan informasi keuangan berupa laporan dan ditujukan kepada pengguna laporan ataupun pihak-pihak berkepentingan lainnya mengenai kinerja keuangan dan kondisi operasional perusahaan (Hery, 2016:5).

2.2 Akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik adalah jasa yang terdiri dari mencatat, mengklasifikasikan dan melaporkan kejadian atau transaksi ekonomi yang akhirnya akan menghasilkan suatu informasi keuangan yang akan dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu untuk pengambilan keputusan yang diterapkan pada pengelolaan dana publik di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya (Wiratna, 2015:1). Sejalan dengan perkembangan maka di negara kita akuntansi sektor publik di definisikan sebagai mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen departemen, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial maupun proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta (Bastian, 2015).

2.3 Pengertian Standar Akuntansi Pemerintahan. Menurut Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa akuntansi adalah proses pengidentifikasian, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan serta menginterpretasikan atas hasilnya. Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah, yang terdiri atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan. Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dalam rangkian transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintah, serta meningkatkan kualitas LKPP dan LKPD". Standar Akuntansi Pemerintahan dinyatakan dalam bentuk pernyataan standar akuntansi pemerintahan (PSAP). PSAP merupakan SAP yang diberi nomor, judul, isi, dan tanggal berlaku. Berikut ini beberapa pengertian standar akuntansi pemerintah menurut para ahli, Dadang Suwanda (2015:8) menyatakan bahwa: "Standar Akuntansi Pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah".

Selanjutnya menurut Baldric Siregar (2015:72) bahwa: "Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah". Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Standar Akuntansi Pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang menerapkan dalam menyusun penyajian laporan keuangan pemerintah.

2.4 Indikator Standar Akuntansi Pemerintahan. Menurut Baldric Siregar (2015:79), Abdul Hafiz Tanjung (2015:82), Erlina (2015:11) dan PP No 71 Tahun 2010, pernyataan standar akuntansi pemerintah sebagai berikut :

1. PSAP 1 Penyajian Laporan Keuangan
Pada PSAP 1 diuraikan tujuan laporan keuangan, tanggung jawab pelaporan keuangan, komponen laporan keuangan, serta struktur dan isi laporan keuangan.
2. PSAP 2 Laporan Realisasi Anggaran

- PSAP 2 mengatur tentang penyajian laporan realisasi anggaran. Isi PSAP 2 ini meliputi struktur dan isi laporan realisasi anggaran serta akuntansi anggaran, akuntansi pendapatan LRA, akuntansi belanja, akuntansi surplus/defisit LRA, akuntansi pembiayaan, akuntansi penerimaan pembiayaan, akuntansi pengeluaran pembiayaan, akuntansi pembiayaan neto, dan akuntansi sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.
3. PSAP 3 Laporan Arus Kas
PSAP 3 ini mengatur tentang penyajian laporan arus kas. Laporan arus kas merupakan laporan yang menunjukkan kas awal periode, sumber dan penggunaan kas, serta saldo kas akhir periode.
 4. PSAP 4 Catatan Atas Laporan Keuangan
PSAP ini mengatur penyajian dan pengungkapan yang diperlukan pada catatan atas laporan keuangan. Isi PSAP ini meliputi ketentuan umum serta struktur dan isi informasi dalam catatan atas laporan keuangan.
 5. PSAP 5 Akuntansi Persediaan
PSAP 5 bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi terhadap persediaan. Perlakuan akuntansi yang dimaksud meliputi pengakuan, pengukuran, penilaian, dan pengungkapan. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
 6. PSAP 6 Akuntansi Investasi
PSAP 6 mengatur perlakuan akuntansi untuk investasi. Isi PSAP 6 meliputi klasifikasi investasi dan pengakuan investasi. Pengertian investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi dibagi menjadi 2 yaitu ada investasi jangka panjang dan investasi jangka pendek. Pengakuan Investasi diakui apabila kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang.
 7. PSAP 7 Akuntansi Aset Tetap
PSAP 7 mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tetap seperti klasifikasi aset tetap yang mengklasifikasikan aset pemerintahan yaitu tanah, peralatan mesin, gedung dan bangunan. Selanjutnya ada pengakuan aset tetap yang diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal, kriterianya seperti berwujud, memiliki masa manfaat lebih dari setahun, harga perolehan aset tetap dapat diukur secara andal, dan diperoleh dengan maksud untuk digunakan.
 8. PSAP 8 Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan
Isi PSAP 8 adalah konstruksi dalam pengerjaan, pengakuan konstruksi dalam pengerjaan, dan pengukuran konstruksi dalam pengerjaan. Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan.
 9. PSAP 9 Akuntansi Kewajiban
Isi PSAP 9 meliputi klasifikasi kewajiban, pengakuan kewajiban, dan pengukuran kewajiban. Klasifikasi kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintahan. Selanjutnya pengakuan kewajiban yaitu kewajiban dapat diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Lalu pengukuran kewajiban adalah kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal kewajiban merupakan pada saat pertama kali transaksi berlangsung.
 10. Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang tidak dilanjutkan
Koreksi kesalahan adalah penyajian akun yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Selanjutnya Perubahan kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip atau dasar-dasar yang dipakai oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan, perubahan bisa terjadi apabila ada perubahan dari perundang-undangan atau standar akuntansi pemerintah yang berlaku. Lalu ada Perubahan estimasi akuntansi adalah revisi estimasi karena perubahan kondisi mendasari estimasi tersebut atau karena terdapat informasi baru atau perkembangan lainnya. Dan yang terakhir ada operasi yang tidak dilanjutkan adalah penghentian suatu misi tertentu yang berakibat pelepasan atau penghentian suatu fungsi, program atau kegiatan lainnya.
 11. PSAP 11 Laporan Keuangan Konsolidasi Isi

PSAP 11 mengenai penyajian laporan keuangan konsolidasi.

2.5 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan bagian dari keuangan Negara. Dijabarkan dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang dimaksud dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Negara yang disetujui oleh DPR (Pasal 1, Ayat 7).

Tujuan dan Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) disusun bertujuan sebagai pedoman dari pendapatan dan belanja di dalam setiap melaksanakan aktivitas negara. Dengan disusunnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemerintah akan memiliki sebuah gambaran yang jelas tentang apa saja yang diterima dan yang di keluarkan setiap per tahunnya. Dengan dibentuknya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat dijadikan sebagai pedoman serta dapat menghindari terjadinya penyelewengan, kesalahan dan pemborosan yang akan merugikan Negara.

Ruang Lingkup Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

1. DIPA

DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) yang telah disetujui oleh DPR dan ditetapkan dalam Peraturan Presiden/Perpres mengenai rincian APBN dan disahkan oleh Menteri Keuangan.

2. PAGU ANGGARAN

Pagu Anggaran adalah alokasi anggaran yang ditetapkan untuk mendanai belanja pemerintah pusat dan/atau pembiayaan anggaran dalam APBN. Dalam terminologi pengelolaan APBN, pagu dibagi menjadi tiga termin. Pagu Indikatif ditetapkan pada bulan Maret, pagu anggaran (sementara) ditetapkan bulan Juli, sedangkan yang terakhir adalah alokasi anggaran (pagu definitif) ditetapkan pada bulan November. Ruang lingkup APBN adalah seluruh penerimaan yang berasal dari pajak, non pajak serta hibah dan pengeluaran atau belanja dari pemerintah pusat dan daerah. Jika pengeluaran lebih besar dari pendapatan (defisit) maka dicari pembiayaan yang bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri. Seluruh penerimaan dan pengeluaran ditampung dalam satu akun rekening yang disebut Bendahara Umum Negara (BUN) di Bank Indonesia. Terkait pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), semua penerimaan dan pengeluaran harus tercakup dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sehingga ketika Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dipertanggungjawabkan, semua realisasi penerimaan dan pengeluaran dalam rekening khusus harus dikonsolidasikan ke dalam rekening Bendahara Umum Negara (BUN).

Peneliti Terdahulu. Lisa Umami (2019), tentang Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Menilai Efektivitas Dan Kinerja Keuangan Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo Trenggalek Ditinjau Dari Perspektif Islam mendapatkan hasil rasio efektivitas pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo Trenggalek pada tahun 2015-2018 mengalami peningkatan dan penurunan, sedangkan rasio efisiensi pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo Trenggalek pada tahun 2016 merupakan paling baik selama tahun anggaran 2015- 2018. Iswandi Idris (2019), tentang Analysis of Performance Realization of Government Regional Income and Expenditure Budget in Medan City mendapatkan hasil realisasi Kota Medan dapat dikatakan fluktuatif. Realisasi anggaran tahun 2011 efektif, tahun 2013 kurang efektif, dan 2015 cukup efektif. Deni Juliasari (2020), tentang Budget Report Analysis and Budget Realization Refocusing Covid-19 mendapatkan hasil analisisnya kurang efektif karena pendapatan asli daerah (PAD) di Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang sangat menurun akibat pandemi covid-19, sehingga Balai Besar Kesehatan Olahraga Regional (BKOR) harus mengurangi jumlah pengunjung bahkan sementara dekat untuk penyebaran virus korona. Riska Korompot (2017), tentang Analysis Of Financial Performance In The Government Of North Sulawesi mendapatkan hasil rasio kemandirian Provinsi Sulawesi Utara dalam 6 tahun dari tahun 2010-2015 mengalami peningkatan dan termasuk dalam kategori partisipatif yang artinya cukup mandiri dan telah mengurangi tingkat ketergantungan pada pihak luar dan mengelola dana yang ada seperti pendapatan dalam negeri serta menggambarkan bahwa masyarakat Sulawesi Utara cukup makmur karena mampu berpartisipasi dalam pembayaran pajak yang merupakan salah satu pendapatan daerah terbesar.

3. **METODE PENELITIAN**

Jenis dan sumber data

Jenis data yang digunakan yaitu data kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang tidak dapat diukur dalam skala numerik. Dalam penelitian ini data kualitatif berupa data yang berasal dari hasil wawancara dan dokumentasi dengan Kepala LPKA Kelas II Tomohon, Kepala Subbagian Umum, Kepala Urusan Perlengkapan, Bendahara, dan Pengelola Keuangan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, data primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber primer ini berupa catatan hasil wawancara secara langsung tentang pengidentifikasian masalah atas perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Waleo. Selain itu penulis juga melakukan dokumentasi lapangan dan mengumpulkan data dalam bentuk catatan tentang situasi dan kejadian di LPKA Kelas II Tomohon. Penulis menganalisis data kualitatif dengan cara yaitu:

1. Mendapatkan gambaran umum tentang LPKA Kelas II Tomohon.
2. Memperoleh dan mengumpulkan data yang berkaitan dengan Realisasi Belanja di LPKA Kelas II Tomohon.
3. Menganalisis data yang diperoleh tentang Realisasi Belanja di LPKA Kelas II Tomohon.
4. Menarik kesimpulan dan memberikan saran dari hasil penelitian.

4. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Analisis

Objek dalam penelitian ini dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan (Pasal 1 Angka 3 UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan). Sebelum dikenal istilah lapas di Indonesia, tempat tersebut di sebut dengan istilah penjara. Lembaga Pemasarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis dibawah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman). Lembaga pembinaan sebagai salah satu institusi penegak hukum yang merupakan muara dari peradilan pidana yang menjatuhkan pidana penjara kepada para terpidana. Lembaga pemasarakatan anak atau yang sekarang berganti menjadi lembaga pembinaan khusus anak adalah tempat untuk membina dan mendidik anak didik pemasarakatan (Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak).

Menganalisis Realisasi APBN Tahun 2018-2020. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh entitas pemerintah melalui bendahara yang menambah SiLPA pada tahun anggaran yang bersangkutan, yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- b. Belanja adalah pengeluaran oleh entitas pemerintah melalui bendahara yang mengurangi SiLPA pada tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh pemerintah.
- c. Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk Dana Perimbangan dan Dana bagi Hasil.
- d. Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya yang dalam anggaran pemerintah dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi sedang pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman pada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Hal pertama penyusunan APBN adalah melakukan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) atau kebutuhan anggaran di LPKA Kelas II Tomohon. Hal kedua adalah pengusulan PAGU Indikatif. Berikutnya ada penyusunan PAGU Alokasi. Dan terakhir adalah penyusunan rencana penyerapan anggaran. Keempat hal ini nantinya di usul ke kanwil selaku satuan kerja (satker) wilayah.

4.2 Pembahasan

Tabel 1. Pagu Dan Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2018

KET	PEGAWAI	BARANG	MODAL	HIBAH	TOTAL
PAGU	3,933,208,000	1,351,552,000	0	0	5,284,760,000
REALISASI	3,915,269,429	1,254,861,667	0	0	5,170,131,000
PERSENTASE	(99,54%)	(92,85%)	0,00%	0,00%	(97,83)
SISA	17,938,571	96,690,333	0	0	114,628,904

Sumber: Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon, 2018

Tabel 2. Pagu Dan Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2019

KET	PEGAWAI	BARANG	MODAL	HIBAH	TOTAL
PAGU	3,964,302,000	1,803,444,000	0	0	5,767,746,000
REALISASI	3,942,678,647	1,735,590,471	0	0	5,678,269,118
PERSENTASE	(99,45%)	(96,24%)	0,00%	0,00%	(98,45%)
SISA	21,623,353	67,853,529	0	0	89,476,882

Sumber: Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon, 2019

Tabel 3. Pagu Dan Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2020

KET	PEGAWAI	BARANG	MODAL	HIBAH	TOTAL
PAGU	3,793,419,000	1,719,976,000	209,017,000	0	5,722,412,000
REALISASI	3,739,038,314	1,581,462,627	207,250,056	0	5,527,750,997
PERSENTASE	(98,57%)	(91,95%)	(99,15%)	0,00%	(96,60%)
SISA	54,380,686	138,513,373	1,766,944	0	194,661,003

Sumber: Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon, 2020

Analisis Realisasi APBN Tahun 2018-2020. Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa PAGU Tahun 2018 sebesar Rp 5.284.760.000 terealisasi 97,83% atau sebesar Rp 5.170.131.096. Dengan rincian jenis belanja pegawai sebesar Rp. 3.933.208.000 terealisasi 99,54% atau sebesar Rp 3.915.269.429 dan belanja barang sebesar Rp 1.351.552.000 terealisasi 92,85 % atau sebesar Rp 1.254.861.667. Berdasarkan Tabel 2 dapat dilihat bahwa PAGU tahun 2019 sebesar Rp 5.767.746.000 terealisasi 98,45% atau sebesar Rp 5.678.269.118. Dengan rincian jenis belanja pegawai sebesar Rp. 3.964.302.000 terealisasi 99,45% atau sebesar Rp 3.942.678.647 dan belanja barang sebesar Rp 1.803.444.000 terealisasi 96,24% atau sebesar Rp 1.735.590.471. Dan berdasarkan Tabel 3 dapat dilihat bahwa PAGU tahun 2020 sebesar Rp 5.722.412.000 terealisasi 96,60% atau sebesar Rp 5.527.750.997. Dengan rincian jenis belanja pegawai sebesar Rp 3.793.419.000 terealisasi 98,57% atau sebesar

Rp3.739.038.314, belanja barang sebesar Rp 1.719.976.000 terealisasi 91,95% atau sebesar Rp 1.581.462.627 dan belanja modal sebesar Rp 209.017.000 terealisasi 99,15% atau sebesar Rp 207.250.056

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Realisasi Belanja di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon, maka penulis menarik kesimpulan yang terkait dengan hasil penelitian, yaitu sebagai berikut :

1. Tingkat efektif dan efisien realisasi belanja di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon tahun 2018-2019 sudah mencapai kategori efektif dan efisien karena berada pada predikat 90%-100%, hal ini terlihat dari jumlah realisasi anggaran sebelum pandemi covid-19 dan setelah pandemi covid-19 pada tahun 2018-2020 yaitu sebesar 97,83%.; 98,45%; dan 96,60%. Dapat disimpulkan PAGU tahun 2019 realisasinya paling efisien dan efektif di bandingkan realisasi PAGU tahun 2018 dan PAGU tahun 2020.
2. Pada tahun 2018 APBN di LPKA Kelas II Tomohon adalah Rp 5.284.760.000 realisasinya adalah Rp 5.170.131.096. Pada tahun 2019 APBN di LPKA Kelas II Tomohon adalah Rp 5.767.746.000 realisasinya adalah 5.678.269.118. Pada tahun 2020 APBN di LPKA Kelas II Tomohon adalah Rp 5.722.412.000 realisasinya adalah 5.527.750.997. Dan APBN pada tahun 2018-2020 di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon rata-rata persentase realisasinya diatas 96%.
3. Faktor-faktor penyebab kurangnya realisasi APBN di LPKA Kelas II Tomohon tahun 2018-2020 pada dasarnya sama, yaitu pegawai pensiun, biaya listrik, program Re-Integrasi WBP (Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas), dan program Cuti Mengunjungi Keluarga. Hanya di tahun 2020 karena pandemi covid-19 maka pemerintah mengeluarkan aturan baru dalam bentuk Permenkumham Nomor 10 tahun 2020. Aturan ini secara tidak langsung dapat mengurangi biaya kesejahteraan WBP selama beradadi dalam lapas, seperti bahan makanan, pakaian, dan perlengkapan

5.2 Saran

Berdasarkan analisa data yang telah dibahas sebelumnya, beberapa saran dapat diberikan dalam penelitian ini, antara lain :

1. Harus lebih berusaha lagi dalam meningkatkan Pendapatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon melalui pendapatan kerajinan tangan (handycrafts), perkebunan, perbengkelan dengan memaksimalkan potensi Sumber Daya Manusia (SDM) atau pembinaan pada WPB/Andikpas dan Sumber Daya Alam (SDA), serta mengembangkan potensi-potensi baru yang ada karena ini akan sangat bermanfaat untuk percepatan perekonomian.
2. Bagi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon, penggunaan anggaran sudah begitu baik karena presentase realisasinya diatas 96% dari tahun 2018 sampai tahun 2020.
3. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon sebaiknya meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam penggunaan APBN, terutama dalam situasi pandemi covid-19.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, I. (2015). Akuntansi Sektor Publik. Suatu Pengantar. Yogyakarta: Erlangga.
- Erlina, (2015). Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua. Jakarta: Salemba Empat.
- Hermawan, A. (2002). *Analisis Deskriptif Defisit APBN Indonesia Ditinjau Dari Pandangan Musgrave Periode 1995-2001*. Skripsi. Universitas Airlangga. Surabaya.
- Juliasari, D. (2020). *Budget Report Analysis and Budget Realization Refocusing Covid-19*. Skripsi. Universitas Panca Marga. Probolinggo.
- Idris, I. (2019). *Analysis of Performance Realization of Government Regional Income and Expenditure Budget in Medan City*. Skripsi. Politeknik LP3I. Medan.
- Korompot, R. (2017). Analysis Of Financial Performance In The Government Of North Sulawesi. *Jurnal Accountability*. Universitas Sam Ratulangi. Manado. 6(2), 9-19.
<https://doi.org/10.32400/ja.17755.6.2.2017.9-19>
- Habibi, (2021). Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Pada Institut Agama Islam Negeri Bone. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*. Adaara. 11(2), 122-132.

- <https://dx.doi.org/10.35673/ajmpi.v1i1i2.2135>
- Lestari, N. N. S. A. (2015). Pengaruh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Terhadap Belanja Langsung Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/kota di Provinsi Bali. e-Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha. Vol. 3.
- Nurani, E. S. W. (2006). *Analisis Deskriptif Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Indonesia Ditinjau Dari Pandangan Musgrave 2000-2004*. Skripsi. Universitas Airlangga. Surabaya.
- Rachma, N. (2021). Financial Performance Analysis Of Regional Government. *Jurnal Manajemen Bisnis*. STIE Nobel Indonesia. 8(1), 191-197.
<https://doi.org/10.33096/jmb.v8i1.673>
- Sadeli, L. M. (2015). *Dasar-dasar Akuntansi*. Edisi 1. Cetakan 9. Bumi Aksana.
- Siregar, B. (2015). *Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrua)*. Edisi Pertama. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Sumarsan, (2017). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Indeks.
- Suwanda, D. (2015). *Sistem Akuntansi Akrua Pemerintah Daerah Berpedoman SAP Berbasis Akrua*. Jakarta: PPM Manajemen.
- Tanjung, A. H. (2015). *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua untuk SKPD*. Bandung: Alfabeta.
- Umami, L. (2019). *Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Menilai Efektifitas Dan Efisiensi Kinerja Keuangan Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo Trenggalek Ditinjau Dari Perspektif Islam*. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. Surabaya.
- Wikipedia, (2020). *Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran*.
<https://id.wikipedia.org/wiki/daftarisianpelaksanaananggaran>
- Sulina, I. G. A. 2017. *Peranan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Terhadap Kinerja Pemerintah Desa (Studi Kasus Di Desa Kaba-Kaba Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan*. Skripsi. Universitas Pendidikan Ganesha. Surakarta. Indonesia
- Supriadi, E. 2015: *Pertanggungjawaban Kepala Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Skripsi. Universitas Mataram. Nusa Tenggara Barat.
- Tanor. 2015. Analisis Laporan Keuangan Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pada PT. Bank Artha Graha International Tbk. *Jurnal EMBA*, 608-743.
- Wiratna, 2015;5. *Akuntansi sektor publik : teori, konsep, aplikasi / V. Wiratna Sujarweni ; editor, Mona*
<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1066406>